



**SEKRETARIAT KERJASAMA PELESTARIAN HUTAN INDONESIA
THE INDONESIAN NGO'S NETWORK FOR FOREST CONSERVATION**

Kompleks Liga Mas Indah. Blok E-I/3, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta 12760 INDONESIA
Telephone 0062-21-7981766 Fax: 0062-21-7981766. Email: skephi@cbn.net.id

PRESS RELEASE

Refleksi Akhir Tahun 2007 :

Perusakan Hutan Gagal Dicegah dan Dikurangi

Ada atau tak ada pemerintah, perusakan dan kerusakan hutan di Indonesia ternyata tak pernah mampu dicegah dan dikurangi, bahkan dihentikan. Fungsi pemerintah sebagai regulator dan eksekutor tidak berjalan. Justru berbagai kelemahan kebijakan dan program pemerintah cenderung ikut mendorong meningkatkan perusakan dan kerusakan hutan di Indonesia. Demikian kesimpulan dari kajian dan evaluasi SKEPHI (Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia) terhadap kondisi hutan di Indonesia sepanjang tahun 2007-2008.

Keadaan Hutan Indonesia Periode 2007-2008

Manifestasi dari kehancuran hutan Indonesia ini dibuktikan dengan dipecahkannya rekor *Guinness World Record* yang menetapkan Indonesia pada 2007 sebagai negara penghancur hutan tercepat. Sebagai salah satu dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90 persen hutan di dunia, Indonesia meraih tingkat laju penghancuran tercepat antara 2000 – 2005, yakni dengan tingkat 1,871 juta hektar atau sebesar 2 persen setiap tahun atau 51 kilometer persegi per hari, atau setara dengan 300 lapangan bola setiap jamnya. Padahal tingkat kerusakan tersebut merujuk pada data FAO yang bersifat konservatif.

Angka kehancuran Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi dari 43 negara lain, disusul oleh Zimbabwe setiap tahun sebesar 1,7 persen dari luas hutan tersisa, Myanmar 1,4 persen, dan Brazil hanya 0,6 persen. Kerusakan hutan Indonesia tersebut sebaliknya telah menyelamatkan hutan Cina sebagai negara tujuan ekspor produk kayu terbesar dari Indonesia. Luas hutan Cina setiap tahun malah bertambah luas 2,2 persen. Sebaliknya Indonesia saat ini hanya menyisakan 28 persen hutan primernya.

Hutan primer tersisa, menurut data KLH yang dilansir pada pertengahan tahun 2006, telah menurun drastis. Hutan tersisa berdasarkan citra satelit di Jawa tinggal 19 persen, Kalimantan 19 persen, dan Sumatera 25 persen; jauh di bawah angka 30 persen, yakni luas hutan tersisa di suatu pulau yang diijinkan oleh Undang-Undang Kehutanan. Sedangkan hutan tersisa yang berada di atas tingkat tersebut adalah Papua (71 persen), Sulawesi (43 persen), dan Bali (22 persen). Sedangkan hutan bakau (*mangrove*) yang tersisa hanyalah 30 persen dari seluruh hutan bakau yang ada di tanah air sebelumnya. Bahkan saat ini 43 juta hektar area hutan telah menjadi lahan kritis.

Berdasarkan data kerusakan hutan pada tingkat 1,8 – 2,8 juta hektar per tahun tersebut, dalam waktu 15 – 22 tahun hutan alam Indonesia akan habis. Untuk pulau Sumatera di perkirakan dalam 5 tahun mendatang hutan alamnya akan musnah, sedangkan kemusnahan hutan untuk pulau Kalimantan akan terjadi dalam 10 tahun mendatang.

Data kerusakan hutan pada masing-masing daerah lebih dramatis lagi, misalnya di Provinsi Lampung 50 persen hutannya sudah rusak akibat perambahan. Sedangkan di Provinsi Riau dari 5.939.422 hektar yang tersisa, pada tahun 2015 hanya tinggal 8 persen atau 476.233 hektar. Sementara itu intensitas perambahan hutan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) naik menjadi 463 persen antara tahun 2005 – 2006. Di Provinsi Bali 26 ribu hektar hutan dari 127 ribu hektar hutan yang ada dalam kondisi kritis. Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sekitar 161.459 hektar hutan atau seluas 50 persen dari 322.919 hektar hutan yang ada di kawasan tersebut telah rusak berat. Hutan-hutan gundul juga muncul di daerah ketinggian di lereng-lereng gunung yang sangat mengkhawatirkan, misalnya lahan gundul di gunung Sumbing-Sindoro mencapai 2.459,5 hektar.

Kerusakan hutan juga terjadi di kawasan hutan lindung, sebagai kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya. Indonesia memiliki kawasan hutan lindung seluas 32,43 juta hektar dari total areal hutan seluas 130,85 juta hektar. Namun pada tahun 2006 terdapat 24,78 persen dari total luas hutan lindung atau setara dengan 6,27 juta hektar mengalami rusak berat.

Sekitar 10 ribu hektar hutan atau 22 persen dari hutan konservasi di Provinsi Bengkulu rusak berat. Pembalakan liar kini mengancam Taman Nasional (TN) Sebangun dan TN Kutai. Kerusakan ini diakibatkan oleh pembalakan liar, konservasi menjadi perkebunan (sawit), okupasi oleh kegiatan penambangan, dan didistribusikan untuk kegiatan penduduk. TN Bukit Dua Belas dari hasil pantauan pada tahun 2000 telah menyusut lebih dari 10 persen, sedangkan TN Gunung Palung efektif tinggal tersisa 17 persen. Hutan primer di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman di Bandar Lampung, kini tinggal tersisa hanya 26 persen. Akibat pengaktifan kembali HPH di Pulau Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka TN Siberut telah hilang dan hanya menyisakan kawasan inti seluas 4 persen. Sementara itu 10 persen kawasan TN Kerinci Seblat seluas 8.050 hektar telah menjadi lahan kritis.

Penyebab Kehancuran Hutan Indonesia

Kerusakan hutan Indonesia tidak pernah mampu dicegah, dikurangi, dan dihentikan sejak rezim Orde Baru memegang tampuk kekuasaan. Sistem pemberian konsesi penebangan hutan atau hak pengelolaan hutan (HPH) merupakan penyebab utama kehancuran hutan. Apalagi pemberian dan pelaksanaan HPH dilaksanakan pada sistem yang kolusif dan korup. Hal ini menyebabkan sistem pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*) tidak bekerja. Selama lebih dari 35 tahun yang berlaku justru sistem pengelolaan hutan yang liar, suatu sistem yang menjadi dasar dari terjadinya pembalakan "liar". Dikatakan "liar" karena setiap kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak pernah menjamin terwujudnya prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Setelah reformasi, kondisi hutan Indonesia pun masih tidak mengalami perbaikan, tetapi justru mengalami penghancuran secara dramatis. Sistem seperti ini merupakan konsekuensi dari sikap Departemen Kehutanan yang pada tahun 1998 menolak

melakukan reformasi terbuka, tetapi justru melakukan reformasi pura-pura (pseudo reformasi) yang dilakukan secara internal oleh Litbang Dephut dengan membekukan "Forum Reformasi Kebijakan Kehutanan" yang melibatkan beragam *stakeholders*. Sikap ini rupanya menjadi ciri-ciri pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia yang picik dan tertutup sebagai pemburu rente yang mengutamakan eksploitasi hutan daripada konservasi dan reservasi. Bahkan selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada kejelasan sikap Departemen Kehutanan untuk menahan pesatnya laju ekstraksi sumberdaya hutan yang menyebabkan terjadinya kehancuran hutan Indonesia.

Kehancuran hutan tropis Indonesia selama tahun 2007 ini disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kepemimpinan Nasional yang lemah, suatu profil kepemimpinan yang tidak memiliki visi dan konsep yang jelas untuk mengelola hutan secara lestari. Bahkan pada saat pembalakan liar atau pencurian kayu sebagai kejahatan korporasi merajalela yang menuntut keterlibatan presiden, pimpinan nasional tidak mau mengambil inisiatif memberantas pembalakan liar dengan mengkoordinasikan lembaga yang berwenang.
2. Lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) sama-sekali tidak memiliki kepedulian untuk mewujudkan kelestarian hutan yang memiliki fungsi ekonomi dan sekaligus ekologi. Yang ironis lagi adalah eksploitasi hutan telah dijadikan sebagai "ATM" untuk menutup biaya politik para oknum dari lembaga-lembaga negara tersebut.
3. Sikap standar-ganda dan inkonsistensi dari pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan kehutanan. Konsep-konsep pengelolaan selama ini telah dijadikan selimut bagi kebijakan dan tindakan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
4. Adanya konspirasi busuk antara lembaga-lembaga formal dengan para pelaku bisnis illegal dan pembalak liar di sektor kehutanan untuk terus-menerus menjarah hutan secara tidak bertanggung-jawab. Konspirasi ini telah melanggengkan pencurian kayu sebagai kejahatan korporasi yang sulit dihentikan.
5. Penguasaan informasi dan distribusi informasi oleh elit selama ini telah menutup fakta dan kebenaran tentang kondisi dan kebijakan yang terkait dengan kehutanan. Kebohongan publik dan demagogi tentang isu kehutanan telah melemahkan usaha publik dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan kehutanan selama ini.

Jakarta, 28 Desember 2007

S.Indro Tjahyono
Direktur SKEPHI